

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengembangan Pariwisata

Menurut Sukmadinata, pengembangan adalah serangkaian langkah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pembuatan produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada. Menurut Wiryokusumo, pengembangan pada hakekatnya adalah usaha pendidikan baik formal maupun informal yang disengaja, direncanakan, diarahkan, diselenggarakan, dan bertanggung jawab dalam hal memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan kepribadian dasar yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan, dan kemampuan, sebagai bekal diri untuk meningkatkan, mengembangkan diri menuju pencapaian harkat, kualitas, dan kemampuan manusia yang optimal.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1990, Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terpaut dalam bidang tersebut.² Dalam KBBI disebutkan bahwa pariwisata merupakan aktivitas yang berkaitan dengan perjalanan rekreasi.³ Definisi lain menyebutkan bahwa pariwisata adalah beragam aktivitas kepariwisataan yang didukung oleh beragam fasilitas dan layanan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan pemerintah daerah (UU Kepariwisata No. 10 Tahun 2009). Jika dilihat dari perspektif akademik, pariwisata digambarkan sebagai ilmu yang mengkaji bagaimana manusia keluar dari lingkungannya, termasuk industry yang memenuhi kebutuhan tersebut. Lebih jauh lagi

¹ Ricky Septiwirawan dkk, "Upaya Pengembangan Wisata Bahari di Pulau Maratua Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau," *eJournal Ilmu Administrasi Publik*, no. 8 vol. 3, (2020): 9294, diakses pada 12 Desember, 2022, [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/08/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Genap%20\(08-02-20-10-32-36\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/08/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Genap%20(08-02-20-10-32-36).pdf)

² Hayat dan Raudhatul Adhawiyah Novita Zaini, *Pencanangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan*, (Malang: Inteligensia Media, 2018), 16.

³ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Bali: Pustaka Lasaran, 2017), 15.

pariwisata meneliti bagaimana bisnis dan wisatawan memengaruhi lingkungan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan fisik setempat. Sedangkan menurut ilmu sosiologi, ada tiga komponen utama pariwisata, yaitu:

- a. A *dynamic element*, yaitu mengunjungi objek wisata.
- b. A *static element*, yaitu singgah di lokasi.
- c. A *consequential element*, atau hasil dari dua yang pertama (terutama untuk masyarakat lokal), yang mencakup pengaruh pariwisata terhadap ekonomi, sosial budaya dan masyarakat.⁴

Barreto dan Giantari mendefinisikan bahwa pengembangan pariwisata sebagai upaya untuk memajukan daya tarik wisata lebih baik dan lebih menarik dari segi tempat dan hal-hal yang ada di dalamnya untuk menarik wisatawan kesana.⁵ Joyosuharto mengklaim bahwa pengembangan pariwisata mempunyai tiga tujuan, yaitu:

- a. Mengalakkan ekonomi
- b. Menegakkan kepribadian bangsa & kelestarian manfaat dan kualitas lingkungan hidup
- c. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa⁶

Selanjutnya, terdapat 5 (lima) pendekatan terkait pengembangan pariwisata, yakni:

⁴ Hary Hermawan, “Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal” *Jurnal Pariwisata*, no. 2 vol. 3, (2016): 107, diakses pada 12 Desember, 2022, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jp/article/download/1383/1302>

⁵ Ricky Septiwirowan dkk, “Upaya Pengembangan Wisata Bahari di Pulau Maratua Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, 9294.

⁶ Febrianti Dwi Cahya Nurhadi dkk, “Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *Jurnal Administrasi Publik*, no. 2 vol. 2, (2014): 327, diakses pada 12 Desember, 2022, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190566&val=6469&title=Strategi%20Pengembangan%20Pariwisata%20Oleh%20Pemerintah%20Daerah%20Terhadap%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20PAD%20Studi%20Pada%20Dinas%20Pemuda%20Olahraga%20Kebudayaan%20dan%20Pariwisata%20Kabupaten%20Mojokerto>

a. *Boostern Approach*

Pendekatan ini menyatakan bahwa pariwisata sebagai manfaat bagi suatu lokasi dan penghuninya. Namun, cara ini tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan tidak mempertimbangkan secara cermat daya dukung kawasan.

b. *The Economic Industry*

Pendekatan untuk mengembangkan pariwisata menempatkan penekanan yang lebih kuat pada tujuan ekonomi daripada tujuan sosial dan lingkungan serta menjadikan pengalaman wisata sebagai tujuan utama.

c. *The Physical Spatial Approach*

Dengan rencana pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata ruang, pendekatan pengembangan pariwisata ini memanfaatkan lahan geografis. Misalnya pembagian kelompok pengunjung untuk menghindari konflik antar pengunjung.

d. *The Comunity Approach*

Strategi untuk mempromosikan pengembangan pariwisata yang memberikan penekanan kuat pada pemaksimalan keterlibatan masyarakat.

e. *Sustainable*

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang memperhitungkan kepentingan masa depan terhadap sumber daya, aspek berkelanjutan, dan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap lingkungan.⁷

2. Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata adalah salah satu faktor yang membuat dan menjadikan suatu tempat menjadi lokasi wisata. Bergantung dari kemampuan atau potensi yang dimiliki, setiap tempat wisata memiliki daya tarik yang beragam. Berikut adalah berbagai daya tarik wisata yang biasanya ditunjukkan di tempat wisata:

⁷ Binahayati Rusyidi dan Muhammad Fedryansah, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, no. 3 vol. 1, (2018): 156, diakses pada 12 Desember, 2022, <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/download/20490/9358>

- a. Daya tarik wisata alam (*natural tourist attractions*), semua lokasi wisata yang terjadi secara alami, termasuk air terjun, lautan, danau, pantai, lembah, bukit, gunung, ngarai, sungai, dan hutan.
- b. Daya tarik wisata buatan manusia (*man made tourist attractions*) melingkupi: Daya tarik wisata budaya seperti tari-tarian, wayang upacara adat, lagu, upacara ritual dan daya tarik wisata yang merupakan hasil karya cipta, misalnya: seni pahat, ukir, lukis, bangunan seni.

Daya tarik wisata memiliki potensi sendiri sebagai unsur produk pariwisata karena mampu memberikan inspirasi kepada pengunjung dan menarik mereka untuk berlibur.⁸

3. Bentuk Pariwisata

- a. Menurut Asal Wisatawan

Apakah wisatawan ini berasal dari dalam atau luar negeri. Pariwisata domestik mengacu pada perjalanan yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari negaranya sendiri berbeda dengan pariwisata asing yang mengacu pada perjalanan yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari luar negaranya sendiri.

- b. Menurut Akibatnya Terhadap Neraca Pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri yakni membawa valuta asing. Arus masuk devisa ini memiliki dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjungi wisatawan ini disebut pariwisata aktif.

Sedangkan pariwisata pasif adalah istilah untuk dampak negatif yang ditimbulkan oleh kepergian warga negara ke luar negeri terhadap neraca pembayaran luar negeri negara tersebut.

- c. Menurut Jangka Waktu

Jumlah waktu yang dihabiskan wisatawan di suatu lokasi atau negara juga diperhitungkan saat menghitung kontribusi mereka. Hal ini memunculkan istilah pariwisata jangka pendek dan jangka panjang.

⁸ Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2016), 14.

d. Menurut Jumlah Wisatawan

Kesenjangan ini ditentukan oleh jumlah wisatawan yang datang, apakah wisatawan datang sendiri atau berkelompok. Sehingga muncul istilah tunggal dan pariwisata rombongan.

e. Menurut Transportasi yang Dipergunakan

Menurut ini maka ada pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api, mobil tergantung pada transportasi yang dipergunakannya.⁹

4. Desa Wisata

Pengembangan pariwisata desa di Indonesia terus dilakukan, hal ini karena melihat peran pariwisata yang dicitakan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Desa wisata merupakan lingkungan pedesaan yang menjanjikan keseluruhan kondisi yang memperlihatkan keaslian pedesaan dari sisi sosial, ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, mempunyai arsitektur dan tata letak khas desa atau aktivitas ekonomi yang khas dan menarik, serta memiliki potensi untuk meningkatkan semua hal yang berkaitan dengan wisata, seperti pertunjukan, penginapan, makanan dan minuman, souvenir, dan kebutuhan lainnya bagi wisatawan.¹⁰

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terikat secara teritorial yang diakui, yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan dan mengelola kepentingan masyarakat lokal berdasarkan norma budaya dan tradisi dihormati dan diakui oleh struktur pemerintahan NKRI.¹¹ Sedangkan, menurut Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2019 Desa wisata merupakan bentuk kesinambungan antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan dalam suatu lingkungan tertentu yang didukung oleh pertunjukan, penginapan, dan fasilitas lainnya

⁹ Lukmanul Hakim, "Industri Pariwisata dan Pembangunan Nasional," *Among Makarti*, no. 5 vol.3, (2010): 74, diakses pada 12 Desember, 2022, <https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/download/18/16>

¹⁰ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, 215.

¹¹ Hayat dan Raudhatul Adhawiyah Novita Zaini, *Pencanangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan*, 10.

sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat.¹² Definisi lain menyebutkan bahwa Desa wisata adalah desa yang mempunyai daya tarik yang khas dan istimewa dalam bidang pariwisata yakni dari segi ciri fisik kawasan pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang diatur dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan sarana penunjang pariwisata, dalam kawasan yang serasi dan penyelenggaraan yang baik dan teragenda sehingga mampu menerima dan mendorong kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta dapat mendorong kegiatan ekonomi terkait pariwisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Menurut Muliawan, desa wisata memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai potensi yang khas dan daya tarik wisata yang unik yakni dari segi ciri fisik kawasan pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- b. Mempunyai *support* dan kelayakan fasilitas penunjang pariwisata yang berkaitan dengan aktivitas desa wisata berupa tempat singgah, area atau ruang komunikasi antara masyarakat dengan wisatawan/tamu, atau fasilitas penunjang lainnya.
- c. Mempunyai komunikasi dengan sasaran/target (wisatawan) yang terlihat dari kedatangan wisatawan ke lokasi desa tersebut.
- d. Adanya *support*, ide dan keikutsertaan masyarakat sekitar dalam pengembangan desa yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata (sebagai desa wisata).¹³

Menurut penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa desa wisata adalah jenis wisata yang lingkungannya kecil dan memiliki deretan wisata dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya karena adanya motivasi yang melatarbelakangi orang untuk berwisata. Akibatnya, setiap wisatawan akan memilih gaya wisata yang paling sesuai dengan preferensi dan tujuan mereka. Selain itu, seseorang berwisata juga disebabkan oleh unsur

¹² Peraturan Daerah, “No. 2 Tahun 2019, Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah,” (12 Desember 2022)

¹³ Hayat dan Raudhatul Adhawiyah Novita Zaini, *Pencanangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan*, 12.

pendukung objek wisata, baik dari keindahan alam maupun keunikan dari objek wisata itu sendiri. Terkait hal ini, desa wisata Rahtawu adalah wisata alam serta kebudayaan yang berawal karena memiliki daya tarik khas tradisi kebudayaan jawa yang masih sangat kental serta kehidupan sosial-ekonomi dan aktivitas sosial-budaya masyarakat dan keunikan khas perayaan hari-hari besar jawa.

5. Bentuk Usaha Pariwisata

Usaha pariwisata merupakan usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata serta melayani kebutuhan wisatawan dan mengelola perjalanan. Usaha pariwisata dibagi menjadi beberapa kategori berikut, menurut UU RI Nomor 9 Tahun 1990 mengenai Kepariwisataaan yang meliputi:

- a. Usaha jasa pariwisata melingkupi penyediaan jasa pengagendaan, jasa pelayanan, dan jasa pengelolaan pariwisata, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Jasa biro perjalanan wisata
 - 2) Jasa agen perjalanan wisata
 - 3) Jasa pramuwisata
 - 4) Jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran
 - 5) Jasa impresariat
 - 6) Jasa konsultan pariwisata
 - 7) Jasa informasi pariwisata
- b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata melingkupi aktivitas membuat dan mengatur obyek dan daya tarik wisata serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, begitu juga aktivitas mengatur obyek dan daya tarik wisata yang sudah ada. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dibagi menjadi:
 - 1) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam
 - 2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya
 - 3) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus
- c. Usaha sarana pariwisata melingkupi aktivitas pengaturan, penyediaan, dan pembangunan fasilitas serta pelayanan yang dibutuhkan dalam pengelolaan pariwisata. Usaha sarana pariwisata meliputi:
 - 1) Penyediaan akomodasi

2) Penyediaan makan dan minum¹⁴

6. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan lepasnya seseorang dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan ketakutan sehingga mampu mendapatkan kehidupan yang aman dan tenteram lahir dan batin. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial menjabarkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan keadaan tercukupinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mampu hidup lebih baik dan mengembangkan diri, sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut UU No. 11 Tahun 2009, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah usaha yang terencana, teratur, dan berjangka panjang yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat guna membentuk pelayanan sosial untuk mencukupi kebutuhan dasar setiap warga negara yang melingkupi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹⁵

Menurut agama Islam, esensi kesejahteraan masyarakat adalah seseorang/ kelompok yang hidupnya tidak dalam ketakutan dan tidak dalam kesedihan. Ketakutan adalah kecemasan tentang sesuatu yang negatif di masa depan. Sedangkan kesedihan adalah kecemasan terhadap hal yang tidak baik yang pernah dilalui. Guna mencapai hal tersebut, Allah telah memerintahkan berbagai hal dalam QS. al-An'am 82, al-A'raf 96 dan an-Nur 55, yaitu beriman dan tidak dzalim serta mengerjakan amal shaleh.¹⁶

Menurut penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep kesejahteraan mempunyai beberapa komponen

¹⁴ Undang-Undang RI, “No. 9 Tahun 1990, Kepariwisataaan,” (12 Desember 2022)

¹⁵ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara,” *Jurnal Riset Akuntansi*, no. 2 vol. 9, (2019): 40, diakses pada 12 Desember, 2022, <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/download/602/570>

¹⁶ Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Journal of Qur'an dan Hadis Studies*, no. 1 vol. 3, (2020):10, diakses pada 12 Desember, 2022, <http://at-tibyan.fusa.uinjambi.ac.id/index.php/ATB/article/download/15/14>

penting, antara lain tercukupinya kebutuhan dasar dan kemampuan untuk menjalankan kewajiban sosial warga negara. Usaha yang berkaitan dengan kesejahteraan dapat dilaksanakan terpisah dan bersama-sama. Kesejahteraan memiliki 2 (dua) jenis yaitu:

a. Kesejahteraan Perorangan

Kesejahteraan perorangan didefinisikan sebagai kesejahteraan yang berkaitan dengan psikologi seseorang sebagai akibat dari pendapatan, kemakmuran dan faktor ekonomi lainnya. Sejauh mana kebutuhan warga negara yang bersangkutan terpenuhi, identik dengan tingkat kesejahteraan perorangan.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan yang mencerminkan keadaan kehidupan masyarakat yang dibuktikan dengan kualitas hidupnya.¹⁷

Adapun tolak ukur yang dipakai oleh para ilmuwan sosial guna mengukur keadaan kesejahteraan sosial cukup beragam. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), alat yang dikembangkan UNDP untuk menilai pencapaian pembangunan dan kesejahteraan suatu bangsa, dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana pembangunan dan kesejahteraan manusia telah dicapai. IPM yang didasarkan pada tiga faktor termasuk harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah (*mean years of schooling*), dan paritas daya beli, berfungsi sebagai indikator kesejahteraan masyarakat suatu daerah atau bangsa. Tolak ukur angka harapan hidup mengukur kesehatan, tolak ukur angka melek huruf penduduk dewasa dan durasi rata-rata bersekolah mengukur pendidikan dan tolak ukur daya beli mengukur standar hidup.

Rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*) adalah empat indikator yang terlihat dari konsep kesejahteraan yang dirumuskan sebagai persamaan arti dari konsep martabat manusia. Tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah memiliki beberapa

¹⁷ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara," *Jurnal Riset Akuntansi*, 40.

tolak ukur yang bisa dibuat sebagai patokan, yaitu tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan keadaan perumahan serta fasilitas yang dipunya dalam rumah tangga.¹⁸

7. Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Ekonomi

Pelaku ekonomi sektor pariwisata digerakkan oleh kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata karena adanya penawaran dan permintaan terhadap produk dan jasa. Sebagai akibat dari peningkatan permintaan barang dan jasa yang disebabkan oleh pengunjung, pebisnis memasok barang mereka untuk memenuhi permintaan.

Mutiplier impact yang dibawa oleh pariwisata berpotensi menggerakkan pasar dan mendorong investor menanamkan uangnya pada industri yang berkontribusi terhadap pariwisata. Beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh industri pariwisata yakni jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa penyedia hiburan, jasa pramuwisata, jasa pramuniaga, jasa pramusaji, jasa salon, jasa keamanan, jasa kesehatan, jasa iklan, jasa kerajinan, jasa angkutan setempat (taksi, becak, delman, cidomo, ojek)

Menurut Cohen yang dikutip Ismayanti, dampak pariwisata terhadap perekonomian secara umum adalah:

- a. Dampak terhadap penerimaan devisa
- b. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
- c. Dampak terhadap kesempatan kerja
- d. Dampak terhadap harga dan tarif
- e. Dampak terhadap distribusi manfaat dan keuntungan
- f. Dampak terhadap kepemilikan dan pengendalian
- g. Dampak terhadap pembangunan

¹⁸ Rizki Afri Mulia dan Nika Saputra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang,” *Jurnal El-Riyasah*, no. 1 vol. 11, (2020): 72, diakses pada 12 Desember, 2022, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/download/10069/5300>

h. Dampak terhadap pajak untuk pemerintah¹⁹

Banyak negara termasuk Indonesia memandang pariwisata sebagai penggerak ekonomi utama atau sumber devisa bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, meskipun pariwisata telah diakui sebagai penggerak ekonomi yang signifikan di suatu negara, pariwisata juga menyembunyikan sejumlah faktor yang jarang diperhitungkan dan diungkapkan, akibatnya sangat sulit untuk menunjukkan peran atau kekurangannya. Berikut ini adalah berbagai dampak positif dan negatif pariwisata terhadap perekonomian:

a. Dampak Positif Pariwisata Terhadap Perekonomian

1) *Foreign Exchange Earnings*

Pengeluaran untuk industri pariwisata dapat meningkatkan ekonomi daerah, mendorong investasi, dan mengarah pada pertumbuhan industri keuangan serta sektor ekonomi lainnya. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa perkembangan industri devisa yang menawarkan pelayanan dan kemudahan kepada wisatawan merupakan akibat langsung dari kedatangan wisatawan di suatu lokasi wisata.

2) *Contributions To Government Revenues*

Ada dua bagian bagaimana pariwisata memengaruhi pendapatan pemerintah, yakni kontribusi langsung dan kontribusi tidak langsung. Pendapatan jasa suatu destinasi mendapat iuran langsung berupa pajak penghasilan dari pegawai pariwisata dan pelaku usaha di kawasan wisata. Sementara pajak atau bea cukai atas barang impor dikenakan terhadap wisatawan dan merupakan tambahan tidak langsung dari pariwisata ke pendapatan.

3) *Employment Generation*

Sudah dibuktikan bahwa sektor pariwisata internasional berkontribusi penting terhadap terciptanya lapangan pekerjaan dan penciptaan bisnis yang berkaitan dengan pariwisata contohnya pendirian

¹⁹ I Gusti Bagus Arjana, M.S., *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 157.

penginapan, rumah makan, *club*, taksi, dan usaha seni kerajinan cinderamata.

4) *Infrastructure Dvelopment*

Sebagai akibat logis dari pertumbuhan industri pariwisata juga berpengaruh pada pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang layak, termasuk penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan layanan tambahan lainnya yang semuanya mampu mendorong kualitas hidup bagi wisatawan dan masyarakat setempat.

5) *Development of Local Economics*

Nilai fiskal suatu tujuan wisata seringkali ditentukan oleh pendapatan sektor tersebut. Seringkali ada beberapa pendapatan asli daerah yang tidak mudah untuk dihitung karena tidak semua pengeluaran wisatawan dapat dilihat dengan jelas contohnya pendapatan para pekerja non formal seperti sopir taksi ilegal, pramuwisata ilegal, dan lain sebagainya.

b. Dampak Negatif Pariwisata Terhadap Perekonomian

1) Kebocoran

Leakage (kebocoran) pembangunan pariwisata pada daerah wisata dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu *import leakage* dan *export leakage*. *Import leakage* terjadi saat permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang dimanfaatkan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan minuman non lokal yang tidak dapat diusahakan oleh masyarakat setempat atau dalam negeri. Sedangkan *export leakage* biasanya terjadi pada pembangunan obyek wisata khususnya di negara berkembang yang cenderung membutuhkan dana dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya.

2) *Enclave Tourism*

“*Enclave tourism*” mengacu pada perjalanan yang lokasinya hanya digunakan sebagai persinggahan.

3) *Infrastructure Cost*

Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata berstandar internasional dapat menjadi sumber pengeluaran berbeda bagi pemerintah, sehingga diperlukan peningkatan pada sektor pajak, yang pada akhirnya memerlukan peningkatan beban pajak yang dibebankan pada masyarakat umum.

4) *Increase in Prices (Inflation)*

Naiknya permintaan wisatawan berdampak pada peningkatan harga, atau “inflasi” yang tidak diragukan lagi akan berpengaruh negatif pada masyarakat setempat yang pada kenyataannya tidak mengalami kenaikan penghasilan secara memadai. Jika pendapatan daerah lokal naik tetapi tidak sebanding dengan kenaikan harga, maka akan mengakibatkan rendahnya daya beli daerah.

5) *Economics Dependence*

Keanekaragaman industri dalam suatu perekonomian mengungkapkan kekuatan suatu bangsa, jika suatu negara hanya bergantung pada satu industri seperti pariwisata misalnya, ia akan menjadi terlalu bergantung pada industri pariwisata, yang menempatkan ketahanan ekonominya pada risiko yang sangat tinggi.²⁰

8. **Pariwisata dalam Perspektif Islam**

Kata pariwisata berawal dari kata “pari” yang artinya banyak, berkali-kali, berputar-putar dan “wisata” yang berarti bepergian atau perjalanan. Jadi, pariwisata didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melibatkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain karena beberapa sebab.

Menurut bahasa Arab, bepergian atau melakukan perjalanan khusus untuk bersenang-senang dinamakan rihlah. Berbeda dengan safara yang mengacu pada perjalanan dengan tujuan yang lebih luas. Al-Qur’an juga menyebut istilah rihlah sebagai representasi dari rutinitas masyarakat Quraisy yang

²⁰ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Bali: Pustaka Lasaran, 2017), 165.

biasanya melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas.

Dalam perspektif islam memandang pariwisata memiliki nuansa religi yang merupakan manifestasi dari kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi. Perspektif agama tentang aktivitas sosial dan amaliah syari'ah dibahas dalam muamalah. Menurut Ibn al-Qaiyim al-Jauziah syariat biasanya berpijak pada maqashid syari' dan tujuan sebenarnya adalah mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh di dunia dan di akhirat. Tentu saja perbedaan antara kemaslahatan atau manfaat dan mafsadat (keburukan), di mana menjauhi keburukan lebih baik daripada memilih kebaikan juga harus diperhitungkan. Selaras dengan itu, memilih yang paling baik daripada yang layak juga harus diprioritaskan. Hal ini terkait dengan gagasan bahwa jika industri pariwisata berdampak pada kemanfaatan maka perspektif agama adalah positif. Namun, jika situasinya terbalik, maka perspektif agama niscaya akan negatif terhadap aktivitas yang berhubungan dengan pariwisata itu. Dalam hal ini berlaku kaidah menjauhi keburukan (mafsadat) lebih utama daripada memilih kebaikan (maslahat).

Oleh karena itu, jika industri pariwisata dikelola dengan baik untuk memperoleh maksud yang baik, maka pandangan agama akan baik. Meskipun niat di balik pariwisata adalah untuk memberi manfaat bagi orang dan masyarakat, jika dilaksanakan dengan kaidah yang bertentangan dengan hukum syariat, maka pandangan agama akan negatif.

Wisata yang menyimpang pasti berlawanan arah dengan agama. Terkait hal ini, agama apa saja mengharamkannya. Lebih dari itu, pariwisata mampu menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang mulia dan tinggi.²¹

Dalam kesejarahannya, gagasan “*ziyarah*” yang secara harfiah berarti “*mengunjungi*” diperkenalkan ketika islam pertama kali menjadi agama global dan saat itulah pariwisata dalam tradisi islam pertama kali dimulai. Budaya ziyarah ini

²¹ Shofwam Karim, “Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Islam,” *TAJDID*, no. 1 vol. 16 (2013): 119, diakses pada 22 Desember, 2022, <https://www.academia.edu/download/43611153/6-7-1-SM.pdf>

memunculkan berbagai organisasi islam yang diatur oleh moralitas dan hukum. Kemudian lahirlah gagasan *dhiyah*, yaitu tatakrama kunjung-berkunjung yang membahas akhlak dan tatakrama dalam interaksi antara tamu (*dhaiif*) dengan tuan rumah (*mudhif*). Gagasan *ziyarah* tersebut telah berkembang dan memunculkan banyak manifestasi.

Ada berbagai istilah yang berkaitan dengan pariwisata dalam tradisi islam. *Siyar, Safar, Al-Siyahah, Al-Ziyara, atau Al-Rihlah* adalah beberapa diantaranya. Kata “*Al-Siyahah*” lebih disukai dalam bahasa arab modern untuk menggambarkan pariwisata. *Al-siyahah* adalah bahasa arab untuk “pergi kemanapun dengan tujuan apapun” (mutlak bukan muqayyad). *Al-siyahah* muncul beberapa kali dalam Al-Qur’an. (QS. Al-Taubah: 2 & 112). Islam memiliki berbagai perspektif tentang pariwisata dan perjalanan, antara lain:

- a. Perjalanan disamakan seperti ibadah karena diwajibkan guna memenuhi salah satu dari rukun islam, yakni haji pada bulan tertentu dan umrah ke baitullah setiap tahun.
- b. Gagasan pengetahuan dan pendidikan berkaitan erat dengan pariwisata. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilaksanakan pada awal islam yang bertujuan mencari dan menyebarkan ilmu (Q.S al- Taubah: 112)
- c. Tujuan wisata dalam islam yaitu untuk mengedukasi wisatawan tentang ilmu pengetahuan dan ikhtiar seseorang muslim untuk bertafakur pada ciptaan Tuhan. Tugas melakukan wisata di muka bumi tertera dalam Al-Qur’an (Q.S al-An’am: 11-12 dan al-Naml: 69-70)
- d. Tujuan lainnya yakni untuk mengumumkan dan menunjukkan keagungan Allah dan Rasul-Nya.²²

9. Pariwisata dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Triono, kegiatan ekonomi dari sudut pandang ekonomi islam tidak dapat dipisahkan dengan 3 dasar ekonomi islam, yaitu: pertama, kepemilikan, kepemilikan mutlak menurut syariah dapat menjadi landasan untuk menentukan siapa yang

²² Fahadil Amin Al Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah),” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, no.1 vol. 2 (2017): 62, diakses pada 22 Desember, 2022, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/download/126/67>

boleh menerima imbal hasil atas perusahaan yang dikelola. Contohnya hutan, laut, danau, sungai, pantai, gunung punya siapa? Penyelenggaranya siapa? Sistem pengelolaannya bagaimana? Hasilnya untuk siapa?; museum, infrastruktur negara punya siapa? Penyelenggaranya siapa? Laba bersih untuk siapa? Bagaimana pembagiannya?

Kedua, pemanfaatan kepemilikan, seperti konsumsi yakni penggunaan mengenai harta yang kita punya diatur oleh syariah, yaitu mengenai halal dan haram. Contohnya untuk apa harta yang kita punya? Jika untuk membeli, apa yang dibeli? Barang halal atau haram? Untuk apa dan siapa barang itu dibeli? Selain konsumsi, pemanfaatan kepemilikan juga terkait pengembangan kepemilikan, yakni harta yang akan kita kembangkan, diatur oleh syariah dalam fiqh muamalat bentuk akad-akad syar'i dan dibolehkan syara'.

Berangkat dari pilar pertama kepemilikan dalam kaitannya dengan distribusi pariwisata halal, mekanisme distribusi ekonomi di sektor pariwisata halal juga mencakup dua macam distribusi, yaitu distribusi berbayar (ekonomis), dan distribusi tidak berbayar (non ekonomis). Disaat hiburan dianggap sebagai kebutuhan manusia, maka pemerintah sebagai pelaksana fungsi ri'ayah (pengelolaan), urusan dan kebutuhan masyarakat harus berusaha dipenuhi. Hal itu bisa dilaksanakan dengan membuat sarana hiburan masyarakat yang selaras dengan syariah dan tidak dilarang dalam syara'. Ketika pariwisata dianggap sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka perlu diatur dan dijamin pemenuhan kebutuhan tersebut.

Pada segi pengelolaan, jika diselenggarakan oleh swasta, akad dan pengelolaan yang terjadi dalam aspek pengelolaan, termasuk jenis aset yang dikelola, dan jenis transaksi dalam semua aspek pengelolann harus jelas. Penyaluran kepada masyarakat secara ekonomis hendaklah mengikuti tata cara punya siapa, siapa yang mengelola dan bagaimana pendistribusianya.

Terkait tata cara penyaluran tidak berbayar (non ekonomis) contohnya: saat ini masih banyak masyarakat yang berfikir ulang untuk pergi ke pantai wisata sejenak karena harus

membayar retribusi Rp10.000,- + parkir Rp2.000,- plus biaya lain-lain seperti makan dan sekedar toilet.²³

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang diperoleh terkait model, pengembangan, dan dampak objek wisata, antara lain:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tempat	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	1. Muhammad Sarifudin 2. Sudati Nur Sarifah 3. Gentur Jalungono ²⁴	Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang	Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata Adventure Tourism Village Terhadap Ekonomi, Sosial dan Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang)	Metode kualitatif dan analisis dampak pengembangan	Menjelaskan mengenai dampak wisata dan kontribusi wisata dalam ekonomi masyarakat.	1. Perekonomian masyarakat pelaku desa wisata mengalami peningkatan. 2. Dampak positif terhadap aspek sosial berupa pelestarian seni dan kebudayaan. 3. Meningkatnya bahasa

²³ Nuhbatul Basyariah, "Konsep Pariwisata Halal: Perspektif Ekonomi Islam," *Youth & Islamic Economic Journal*, no. 01s vol. 2 (2021): 4, diakses pada 23 Desember, 2022, <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/viewFile/699/240>

²⁴ Muhammad Sarifudin dkk, "Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata Adventure Tourism Village Terhadap Ekonomi, Sosial dan Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang)," *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, no. 2 vol. 1, (2019): 234, diakses pada 12 Desember, 2022, <http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/download/518/315>

						asing, tingkat pendidikan dan teknologi bagi penggiat pariwisata.
2.	Nunun Nurhajati ²⁵	Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung	Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)	Metode kualitatif, dan analisis dampak pengembangan.	Menjelaskan mengenai dampak wisata dan kontribusi wisata dalam ekonomi masyarakat.	Pembangunan pariwisata di Desa Wisata Mulyosari berpengaruh positif dan negatif terhadap aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
3.	1. Dwi Wahyuni 2. Lina Susilowati ²⁶	Desa Wonomerto Kecamatan Wonosa	Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Perekonomian	Metode kualitatif dan analisis dampak pengembangan	Menjelaskan mengenai dampak wisata dan kontribusi wisata	Kegiatan pengembangan desa wisata di Desa Wonomerto

²⁵ Nunun Nurhajati, "Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)," (2018): 12, diakses pada 12 Desember, 2022, <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/136/128>

²⁶ Dwi Wahyuni dan Lina Susilowati, "Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Perekonomian, Sosial Masyarakat Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Dewantara*, no.

		lam Kabupat en Jomban g	ian, Sosial Masyarakat Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang		dalam ekonomi masyarakat.	berdampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di desa ini.
4.	Harry Hermaw an ²⁷	Desa Wisata Nglangg eran, Kecama tan Pathuk, Kabupat en Gunung Kidul	Dampak Pengemban gan Desa Wisata Nglangga n Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal	Metode kualitatif dan analisis dampak pengemban gan	Menjelaska n mengenai dampak wisata dan kontribusi wisata dalam ekonomi masyarakat.	Pengembang an desa wisata berdampak positif untuk perkembang an ekonomi masyarakat setempat.
5.	Feriani Budiyah ²⁸	Desa Ketenge r, Kecama tan Baturrad en, Kabupat en Banyum as	Implikasi Pengemban gan Desa Wisata Terhadap Peningkata n Ekonomi Masyarakat Lokal Studi Kasus di Desa Ketenger	Metode kualitatif dan analisis dampak pengemban gan.	Menjelaska n mengenai dampak wisata dan kontribusi wisata dalam ekonomi masyarakat.	Keterlibatan masyarakat desa dalam pengembang an desa wisata adalah salah satu rangkaian penguatan potensi desa sehingga

1 vol. 3 (2020): 19, diakses pada 12 Desember, 2022,
<http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/article/download/525/298>

²⁷ Harry Hermawan, "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal," *Jurnal Pariwisata*, 116.

²⁸ Feriani Budiyah, "Implikasi Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Studi Kasus Desa Ketenger," *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi (JEBA)*, no. 2 vol. 22 (2020): 190, diakses pada 12 Desember, 2022,
<http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1594/1588>

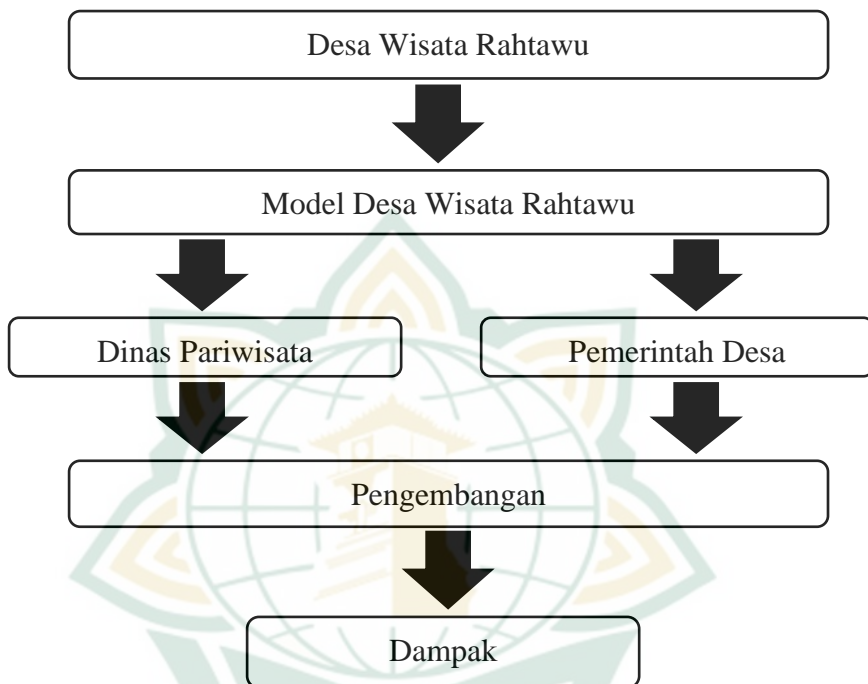
						meningkatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi.
6.	Sani Alim Irhamna ²⁹	Wisata di Dieng Kabupaten Wonosobo	Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar Objek Wisata di Dieng Kabupaten Wonosobo	Pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan melihat kondisi dampak terhadap masyarakat.	Menjelaskan mengenai dampak wisata dan kontribusi wisata dalam ekonomi masyarakat.	Pengembangan pariwisata berdampak positif dari segi fasilitas, pelayanan dan meningkatnya kesempatan kerja, akan tetapi juga berdampak negatif dari segi keamanan dan kebersihan.

C. Kerangka Berpikir

Untuk memperoleh dampak pengembangan desa wisata Rahtawu terhadap perekonomian masyarakat, maka dibuat kerangka pikir guna mempermudah maksud dari penelitian ini.

Oleh karena itu, peneliti memberikan gambaran kerangka berpikir yakni:

²⁹ Sani Alim Irhamna, "Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar Objek Wisata di Dieng Kabupaten Wonosobo," *Economics Development Analysis Journal*, no. 6 vol. 3, (2017): 327, diakses pada 12 Desember, 2022, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/22277/10575>

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Menurut gambar kerangka di atas dapat dijabarkan bahwa skema penelitian ini, dimana Desa Wisata Rahtawu yang ditampilkan dalam penelitian merupakan salah satu yang memberi dampak terhadap perekonomian masyarakat setempat. Adapun pengembangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dan Pemerintah Desa setempat sehingga pengembangan tersusun dan dapat memberi dampak positif terhadap masyarakat. Jika pengembangan terkait pelaksanaan tersebut belum memberikan dampak maka solusi apa yang harus dilakukan sehingga pengembangan Desa Wisata Rahtawu memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal.

D. Pertanyaan Penelitian

Adapun beberapa pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara kepada pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Pertanyaan Wawancara dengan Dinas Pariwisata
 - a. Bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terhadap objek wisata Rahtawu pak/bu?

- b. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terhadap potensi objek wisata Rahtawu?
 - c. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek wisata Rahtawu, pak/bu?
 - d. Bagaimana strategi dari Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek wisata Rahtawu dalam meningkatkan pengunjung, pak?
2. Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Desa
- a. Apa saja potensi wisata yang sedang dikembangkan oleh pemerintah desa, pak?
 - b. Apakah ada peraturan desa yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan wisata Rahtawu, pak?
 - c. Apa saja program desa yang mendukung kegiatan pengembangan wisata Rahtawu, pak?
 - d. Bagaimana kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Dinas Pariwisata dalam pengembangan wisata Rahtawu, pak?
 - e. Apakah ada kegiatan pembinaan dari Pemerintah Desa untuk masyarakat dalam pengembangan objek wisata Rahtawu, pak?
 - f. Apakah ada kelompok khusus yang sengaja dibuat dalam pengembangan dan promosi wisata Rahtawu, pak?
3. Pertanyaan Wawancara dengan Masyarakat
- a. Bagaimana pendapat bapak semenjak desa Rahtawu menjadi objek wisata Rahtawu?
 - b. Apakah penting pengembangan objek wisata Rahtawu dilakukan, pak?
 - c. Bagaimana pandangan bapak terhadap pengembangan Desa Wisata Rahtawu selama ini, apakah ada dampak kepada masyarakat?
 - d. Apakah pengunjung wisata Rahtawu meningkat, pak?
 - e. Untuk kedepannya, apa harapan bapak terhadap objek wisata Rahtawu?